

# PERSEPSI

GORONTALO POST

Selasa, 17 Januari 2017

## Pilkada dan Issue Kemandirian Daerah

**P**ESTA demokrasi di Gorontalo sebentar lagi akan diramalkan oleh dua pemilihan kepala daerah yaitu pemilihan Gubernur Gorontalo dan Bupati Boalemo masing-masing dengan masa bhakti 2017-2022. Saat ini masing-masing calon sedang giat-giatnya menjual program selama lima tahun ke depan kepada masyarakat dan berusaha mendapat kepercayaan masyarakat sehingga bisa terpilih menjadi Gubernur ataupun Bupati. Salah satu topik yang menarik bisa disimak dari para calon adalah sejauh mana program mereka bisa menentukan kemandirian daerah ini dalam jangka panjang. Kemandirian lebih dilihat dari kemampuan suatu daerah mengembangkannya dengan sebesar mungkin mempergunakan daya sendiri, terutama dalam bentuk daya saing yang tinggi, untuk kemakmuran rakyatnya. Kemandirian tidak dilihat dari keterisolasian terhadap perekonomian daerah lain atau dengan

dunia luar, tetapi bagaimana dalam perekonomian yang semakin terbuka dan terintegrasi dengan perekonomian global, daya saing dan kemakmuran rakyat dapat terus ditingkatkan. Sejak diberlakukan UU No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah, di mana pemerintah pusat mendesentralisasikan berbagai aspek kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di seluruh Indonesia, salah satunya desentralisasi pengelolaan keuangan, dimana pemerintah daerah berhak untuk mengelola pendapatan, pengeluaran, dan keuangan negara di daerah pemerintahan sendiri. Seperti disebutkan dalam UU 32/2004 dan UU 33/2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi penciri kemandirian daerah yang terdiri atas Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi, Deviden dari investasi pemerintah dae-

rah, dan pendapatan asli daerah lainnya dan menjadi sumber utama kemandirian daerah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, dan pelayanan masyarakat. Kalau diperhatikan data hingga tahun 2015 PAD Provinsi Gorontalo berkisar 318 milyar rupiah dari total penerimaan berkisar 1,4 triliun rupiah atau secara relatif 21,5% dari keseluruhan penerimaan pemerintah yang sekaligus menggambarkan tingkat ketergantungan Provinsi Gorontalo terhadap dana transfer dari pusat masih berkisar hampir 80%. Bila disimak struktur pengeluaran dari belanja langsung maupun tidak langsung Provinsi Gorontalo terdapat belanja pegawai berkisar 355 milyar rupiah. Kapasitas PAD dalam membiayai belanja pegawai sebesar 89,4% yang berarti belanja pegawai tidak bisa ditutupi dari PAD apalagi kalau diharapkan untuk membiayai pengeluaran pembangunan. Hal ini yang mendasari setiap Kepala Daerah terpilih



Oleh :  
**Dr. Fachrudin Zain Ollingo, SE., M.Si.**

menyusun strategi untuk berburu dana dari pusat.

Untuk Kabupaten Boalemo sendiri, pada tahun 2015 jumlah perolehan PAD berkisar 37,3 milyar rupiah atau sebesar 3,4% dari total penerimaan Kabupaten Boalemo sebesar 691,3 milyar rupiah. Dengan kata lain, ketergantungan Kabupaten Boalemo terhadap dana dari pusat dan Provinsi Gorontalo masih sangat besar berkisar 96,6%. Bila disimak struktur pengeluaran pada belanja pegawai langsung maupun tidak langsung sebesar 278,8 milyar rupiah atau berkisar 41,7% dari total pengeluaran Kabupaten Boalemo sebesar 565,7

milyar rupiah. Dengan demikian kapasitas PAD Kabupaten Boalemo dalam membiayai gaji pegawai hanya sebesar 8,6% yang berarti 91,4% gaji pegawai masih bergantung dari dana transfer apalagi untuk membiayai pembangunan.

Dalam konteks ini, Kabupaten Boalemo memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap sumber pembiayaan eksternal. Untuk itu siapapun yang terpilih menjadi Gubernur atau Bupati nanti memiliki pekerjaan yang berat dalam merealisasikan peningkatan sumber penerimaan dari PAD.

Kendala yang dihadapi adalah adanya keterbatasan sumber-sumber penerimaan yang bisa menopang perolehan PAD. Fransisco Bwariat menyatakan bahwa ada kendala yang dihadapi bagi daerah dalam peningkatan PAD yaitu (1) Konsekuensi kebijakan yang terkandung dalam konstitusi. Dalam UUD 1945, pasal 33 menyat-

akan bahwa tanah, air dan segala sesuatu yang secara signifikan mempengaruhi kehidupan rakyat dikendalikan oleh pemerintah pusat. Akibatnya sumber penerimaan yang strategis seperti pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai meskipun terletak di wilayah pemerintah daerah menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah pusat. Sedangkan pemerintah daerah hanya mengelolah sumber pendapatan yang non-strategis seperti pajak hotel, pajak reklame, dan pajak restoran. Kondisi ini mengakibatkan rendahnya kemandirian keuangan pemerintah daerah. (2) Ketersediaan sarana prasarana di daerah yang dapat menjadi kontribusi pendapatan asli daerah dari obyek pajak daerah dan retribusi daerah misalnya hotel dan restoran, pusat-pusat perbelanjaan dengan areal parkir yang memadai, dan lain-lain, masih relatif terbatas.

Ini merupakan fenomena yang terjadi di hampir seluruh daerah ka-

bupaten/kota. Terlepas dari kendala yang disampaikan Fransisco Bwariat di atas, para pemilih ingridengarkan kiat-kiat dan inovasi para calon dalam meningkatkan perolehan PAD melalui peningkatan ekonomi kerakyatan.

Pemerintah perlu konsisten dengan sasaran kemandirian sehingga tidak terlena dengan rutinas yang ada yang sebetulnya kita hidup dari ketergantungan. Perlu adanya konsistensi untuk memanfaatkan anggaran secara efektif dan efisien sehingga jelas setiap program pembangunan memiliki efek multiplier ekonomi yang secara terukur dan berkelanjutan.

Demikian pula ada kiat-kiat untuk mendorong investasi terutama investasi yang memiliki intensitas tinggi pada pembukaan lapangan pekerjaan (labour intensive).

*\*Penulis Dosen  
Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri  
Gorontalo*